

"Semar Super"

Pertarungan Belum Selesai...

SUPERSEMAR. Siapakah berani memain-mainkannya di waktu lalu? Dia termasuk salah satu "kata keramar", tabu untuk dipersalahkan, sama seperti beberapa kata lain seperti "divifungsi ABRI", "militerisme", ataupun "kekayaan keluarga Soeharto". Kini, "Supersemar" dipelacatkan menjadi *Semar Super*—judul tontonan ketoprak lucu oleh pelawak Basuki, Mandra, dan kawan-kawannya, yang ditayangkan stasiun televisi swasta, Selasa (7/10) malam lalu.

ARUS perubahan politik di negeri ini telah menjungkir-balikkan dominasi pemaknaan dan penafsiran bahasa. Telah terjadi pelucutan makna-makna yang selama ini ditutup-tutupi dan dijadikan serba sakral, seperti "Supersemar" tadi. Dengan kata lain, sebuah proses desakralisasi memang tengah terjadi.

Pada bulan Oktober yang biasa disebut "Bulan Bahasa", ber-

sama Dr Ariel Heryanto, antropolog sosial sekaligus pengajar di National University of Singapore (NUS), *Kompas* memperbincangkan soal bahasa Indonesia tidak hanya sebatas kata, frasa, dan kalimat, tetapi juga asumsi, kerangka berpikir, serta rasionalitas. Itu yang disebut oleh Ariel sebagai *discourse* atau wacana.

"Perubahan bahasa mungkin saja sudah terjadi lebih awal dan

lebih serius sementara *status-quo* politik masih berkacak pinggang. Tetapi pada saat tata politik ambruk, maka percepatan perubahan politik mengejar dan mengungguli perubahan bahasa," kata Ariel.

Contohnya kira-kira, ungkapan "revolusi sosialisme" yang merupakan mantra rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno,

(Bersambung ke hlm 12 kol 1-5)

Pertarungan — —

ketika Soekarno ambruk, Soeharto sudah bangkit, pemerintahan resmi pemerintah baru waktu itu adalah "demi menyelamatkan revolusi sosialisme". I dahal praktiknya, jelas yang kerjakan Orba adalah "revolusi kapitalisme". Perlahan-lahan baru kemudian kata "sosialisme" (kecuali "sosialisme religius" dan "revolusi" (kecuali revolusi dalam dunia mode dan busan, menjadi kata-kata tabu.

"Artinya kita senantiasa terikat oleh warisan bahasa dari rezim lama pada saat mau bicara tentang sesuatu yang baru. Akibatnya kita tergagap-gagap, dan perubahan itu tertatih-tatih. Kalau bahasa kita baru secara total, tidak ada yang mengerti. Dengan kata lain itu bukan bahasa, tetapi semacam kode-kode dalam rumus computer science," kata Ariel.

PENDEKATAN terhadap persoalan bahasa pada pengertian *discourse* atau wacana, mencoba membongkar bukan susunan ka-

(Sambungan dari halaman 1)

ta atau kalimat, bukan pula sejarah sosial atau politik sebuah atau beberapa buah teks. Yang dibahas dan diaduk-aduk di situ adalah proses terbentuknya kata-kata itu yang diandaikan berlandaskan sejumlah asumsi. Hanya mereka yang dapat menggapai asumsi dasar itu dapat melakukan "dekonstruksi".

Ariel mencontohkan, katanya dulu ada pengagum Soekarno yang marah-marah ketika Sekretariat Negara menuduh Soekarno sebagai Marxis. Peristiwa itu terjadi di seputar masa ketika Megawati mulai naik daun. "Kepada pengagum Soekarno yang marah-marah itu saya bertanya: 'Kok marah kenapa? Memangnya Marxis itu jelek? Memangnya Soekarno menganggap Marxis itu busuk? Dengan marah-marah itu berarti kamu masuk dalam perangkap asumsi dasar Orde Baru tentang Marxisme,'" cerita Ariel.

Contoh yang lain, petani Kedung Ombo di masa rezim Orba-Harto pernah menggugat Bupati

Bojolali karena menuduh mereka "ET" dan "tidak bersih lingkungan". Publik pada waktu itu terpesona, di zaman "kemasan militer dan Orba" ada petani yang menggugat pemerintah yang militer. Hanya saja, kalau dinalar lebih jauh, gugatan itu sekaligus memperkuat hegemoni dan wacana Orde Baru, bahwa dituduh "berbau komunis" itu sama dengan cemar, pendosa, dan macam-macam pokoknya lebih pendosa dari koruptor, pembunuhan, pembongkaran dan seterusnya.

Oleh karenanya, dalam strategi pelucutan wacana itu pantas dicatat apa yang diberitakan secara kurang mencolok oleh sebuah surat kabar beberapa waktu lalu, bagaimana sebuah organisasi politik di Semarang menyangkal tuduhan penguasa militer setempat, bahwa mereka "menunggangi" aksi protes yang terjadi di wilayah itu. Mereka menyangkal sebagai menunggangi; sebaliknya memang semata-mata menggerakkan demonstrasi, berdemonstrasi menentang militerisme. (Kalau ar-

gumen mereka diungkapkan dalam bahasa sehari-hari mungkin bunyinya: "Gue tidak menunggangi, tetapi benar-benar menyalakan diri menentang militerisme.")

TELAH pada tingkat wacana menyangkut hubungan bahasa dan kekuasaan ini memang telah lama menarik perhatian para pemikir kebudayaan. Sebuah buku berjudul *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (editor Yudi Latif dan Idi Subandji Ibrahim, diterbitkan oleh Penerbit Mizan, Mei 1996) misalnya, mencoba merangkum pemikiran para penulis dari Benedict Anderson, Goenawan Mohamad, Hilmar Farid, Ignas Kleden, sampai Taufik Abdullah.

Dalam buku itu, editor telah memberi pengantar cukup memadai, untuk melukiskan bagaimana signifikannya telaah mengenai hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Mengutip isyarat dari Evert Vedung (*Political Reasoning*, 1982) misalnya, mereka mengatakan, "Tidaklah

mengada-ada jika dikatakan bahwa jauh sebelum sistem reproduksi materi dioperasikan, Orde Baru terlebih dahulu menjelmakan dirinya menjadi rezim tafsir dan bahasa."

Warisan bahasa Orde Baru yang kuat mencengkeram setelah diceklokkan selama lebih dari 30 tahun benar-benar masih belum bisa begitu saja dihapuskan. Penguasa khususnya tentara masih mempertahankan dengan habis-habisan politik wacana mereka, misalnya dengan "strategi kambing hitam", dan sebaliknya masih kedemnya banyak orang kalau dituduh "kiri", "menunggangi", dan seterusnya.

Reformasi berjalan tertatih-tatih karena diganjak pertarungan wacana, yang belum sepenuhnya direbut oleh mereka yang mengklaim diri sebagai reformis. Di sini timbul pertanyaan, seretnya arus perubahan berikut terbatasnya daya jangkauan perubahan sosial politik di Indonesia saat ini, adakah disebabkan belum radikalnya perubahan berbahasa dan berimajinasi kita? (hri redann)